



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P)

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN MEMPAWAH

JI. RADEN KUSNO No 15 MEMPAWAH KODE POS 78911



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MEMPAWAH**

Jl. RADEN KUSNO No 15
MEMPAWAH

NOMOR S.O.P	065/ /SETWAN/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL PENGESAHAN	
DISAHAKAN OLEH : SEKRETARIS DPRD SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA KABUPATEN MEMPAWAH  RUSPANDI, SH, M. Kn Pembina Utama Muda 19213 1999303 1 004	
NAMA S.O.P	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasi Informasi Publik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah Nomor . UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 9. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 11. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasi Informasi Publik; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017.... Tahun 2021 Tentang PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang pelayanan prima 4. menguasai pengoperasian komputer dan website
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Formulir 2. Jaringan Internet/WIFI 3. Komputer dan printer 4. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KOORDINATOR	PPID PELAKSANA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bagian-Bagian di Sekretariat DPRD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis maupun dinamis serta aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklarifikasi kebenarannya	
2.	Mengklasifikasikan seluruh Informasi dan Dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasar sifat informasi dan dokumentasi.				1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan Informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy.				ATK	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4.	Menetapkan DIDP secara resmi sesuai dgn klasifikasi informasi dan dokumentasi publik		TDK	YA	Mengadakan rapat PPID untuk menetapkan DIDP	Setelah DIDP terkumpul	SK DIDP yg ditanda tangani atasan PPID	Setelah DIDP ditetapka, jika ada tambahan informasi baru di buat SK utk ditetapkan
5.	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) ke Website Resmi Set.DPRD Kabupaten Mempawah maupun melalui media lainnya.				Website Set.dprd Kab. Mempawah resmi	Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten DIDP di Website Set.DPRD Kab. Mempawah	